

STUDI TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PADA UNIT PASAR SURUH KABUPATEN SEMARANG

Nur Fitriyati*

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
Email: nurfitriyati28@gmail.com.

ABSTRACT

The need for good traditional market management as well as the problems occurring in the management of traditional markets into the background of this research. Problems arise: How is the conflict of interest between the Regency Government and the Village Government in the management of Suruh Market Semarang regency? What are the social and economic impacts of conflict of interest between the Regency Government and the Village Government in the management of Suruh Market Semarang regency?

The purpose of this study is to explain how the process of conflict of interest in the management of traditional markets is Suruh Market between the Regency Government and Village Government. In addition to describe and analyze the impacts resulting from the conflict of interest in the management of traditional markets, especially Suruh Market viewed from the social and economic aspects.

This study uses a combined research method between qualitative and quantitative with a qualitative approach fixed as the main approach. Data obtained through interviews and questionnaires. The data obtained from the quantitative approach through the survey is used to reinforce the facts related to the theme and the formulation of related problems. In addition, using Triangulation data sources to compare the results of interviews with one another.

The result of the research shows that conflict of interest occurs because of different interests between parties involved. Regency Government, Village Government and Traders have a mutually striving interest. Conflict of interest occurs when the Regency Government wants to take over and manage the Suruh Market completely but there is a rejection by the Village Government. The social impact that occurs is the decline in the number of traders and competition among traders is getting tougher. While the economic impact is a decline in the turnover of traders.

Keywords: Management, Traditional Market, Interest

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi, baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah dan bahkan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, Pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan Pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Namun dalam pengelolaannya, permasalahan-permasalahan seperti fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang *semprawut* karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan. Keadaan tempat parkir yang seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar sering terjadi, kondisi fisik pasar yang sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau dan tidak tertata rapi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Kabupaten Semarang yang memiliki 33 pasar tradisional yang tersebar di beberapa wilayah juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu Pasar Suruh yang terletak di Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, terdapat berbagai permasalahan diatas dan pemasalahan administrasi mengenai kepemilikan lahan pasar tersebut hingga terjadi tarik menarik status kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Desa Suruh menjadi penghambat dalam rangka pengembangan pengelolaan pasar. Permasalahan status kepemilikan aset dan status Pasar Suruh sampai sekarang

belum terselesaikan dan masih memicu terjadinya perselisihan. Pada tahun 2003/2004 terjadi permasalahan mengenai pembagian pendapatan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pemkab meminta 70% sedangkan Pemerintah Desa mendapat 30%. Namun setelah dimediasi diperoleh kesepakatan dengan pembagian 50% : 50%. Kemudian pada tahun 2015 Perangkat Desa Suruh dan sebagian pedagang berunjuk rasa memprotes hilangnya pendapatan desa sebesar 100 juta per tahun yang disebabkan oleh Pasar Suruh yang akan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Adanya dominasi kekuasaan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dimana pemerintah kabupaten ingin tetap mempertahankan kewenangannya kepada pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional menimbulkan permasalahan atau konflik bagi kedua belah pihak. Di satu sisi apabila pemerintah Kabupaten mengambil alih status pasar tersebut maka desa akan kehilangan pendapatan sebesar 100 juta per tahun. Hal tersebut tentu membuat sumber pendapatan desa berkurang yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan desa. Di sisi lain, jika pengelolaannya di serahkan kepada pemerintah desa maka APBD untuk pengelolaan pasar tradisional tidak akan terserap. Antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa memiliki kepentingan masing-masing yang saling diperjuangkan yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan

2. KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko¹ menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasar tradisional merupakan tempat

¹ Handoko, T.Hani, (2011), *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hlm.8.

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.²

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.³ Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengelolaan pasar tradisional bertujuan untuk:

- a. Memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pasar tradisional
- b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional
- d. Memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada pasar tradisional
- e. Terselenggaranya kemiraan antara pelaku usaha pasar tradisional

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Semarang meliputi: a.Ketertiban dan keamanan pasar; b.Kebersihan dan kenyamanan; c. Persampahan; d.Parkir; e.Penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; f.Perizinan serta penataan pedagang dan PKL; g.Penetapan dan pemungutan retribusi; h.Laporan dan pertanggungjawaban; i.Sanksi

2.2. Tarik Menarik (Konflik) Kepentingan

Konflik kepentingan (Konflik Interes) adalah suatu situasi konflik dimana seorang individu, pjabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan

² Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 05.16 WIB.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

(tujuan) sistem sosial⁴. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.⁵ Konflik kepentingan juga didefinisikan sebagai suatu kasus khusus tentang konflik pada umumnya, yang dinyatakan sebagai suatu keadaan di mana golongan-golongan mengejar tujuan-tujuan yang tidak dapat diakurkan.⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Konflik Kepentingan adalah sebuah konflik berkepentingan yang terjadi ketika sebuah lembaga atau organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan, salah satu yang mungkin bisa merusak motivasi dan dapat timbul tindakan yang tidak etis atau pantas. Sebab-sebab munculnya konflik⁷ antara lain yaitu Perbedaan antara individu-individu; Perbedaan kebudayaan; Perbedaan kepentingan; Perubahan sosial

2.3. Teori *Public Choice* (Pilihan Publik)

Teori pilihan publik ini merupakan sebuah pendekatan ekonomi politik baru dimana dalam teori ini menganggap negara/pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri. Menurut Staniland⁸, teori *public choice* (pilihan publik) adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan publik (masyarakat). Buchanan mengatakan bahwa teori *public choice* menggunakan alat-alat atau metode yang telah dikembangkan ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik (pemerintah, ilmu politik, dan

⁴ Wirawan, (2010), *Konflik dan Manajemen konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 57.

⁵ KPK, (2009), *Konflik Kepentingan (Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*, hlm. 2. (www.kpk.go.id)

⁶ Siregar, E.A, (Eds), (1999), *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana,hlm.132.

⁷ Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo

⁸ Karjuni Dt.Maani,(2013), *Pergulatan Antara Ekonomi dan Politik dalam Perspektif Public Choice*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. hlm.2 diakses dan diunduh melalui <http://ejournal.unp.ac.id> pada 12 Januari 2017 pukul 07.58 WIB.

ekonomi publik).⁹ Bagi Buchanan, teori *public choice* bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari actor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pencinta lingkungan hidup dan sebagainya.¹⁰ Teori *public choice* dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambil keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif.

2.4. Konsep Dampak

Dampak menurut Waralah Rd Christo (2008) adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Pengertian Dampak secara umum menurut Hikmah Arif (2009), dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘sesuatu’. Otto Soemarwoto mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Menurut pendapat Selo Soemardjan, Perubahan Sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melihat dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan pasar tradisional khususnya pada unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Studi tentang Pengelolaan Pasar Tradisional pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan metode

⁹ Op.cit

¹⁰ Ratri Medya & Wisnu Chandra K (Eds), (2006), *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, hlm.139.

deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada, serta dapat menspesifikasikan suatu permasalahan secara obyektif. Pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang dominan di dalam penelitian ini dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan pendukung yang melengkapi hasil dari penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah Pasar Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan subjek penelitian adalah Pihak Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Pasar Suruh, Kepala Desa Suruh dan Pedagang Pasar Suruh. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah survey dengan menyebar kuesioner kepada pedagang dengan jumlah sampel sebanyak 59 pedagang. Teknik pengolahan data kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, men-*coding* berdasarkan tema, membuat deskripsi, menghubungkan deskripsi dari tema-tema, menginterpretasi tema-tema dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pengolahan data kuantitatif menggunakan Rumus Frank Lynch untuk menentukan jumlah sampel dan Rumus Skala Likert untuk memperkuat bukti penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Terjadinya Tarik Menarik Kepentingan

Konflik kepentingan yang terjadi bermula dari adanya rencana pembangunan atau revitalisasi Pasar Suruh oleh Pemerintah Kabupaten. Alasan Pemerintah Kabupaten membangun Pasar Suruh adalah dalam rangka upaya pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Semarang serta untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi daerah dalam hal retribusi pasar. Upaya tersebut ternyata terganjal dengan status kepemilikan tanah pasar yang belum jelas. Kedua belah pihak mempunyai persepsi masing-masing dalam menanggapi hal tersebut. Keduanya memberikan persepsi yang berbeda mengenai kepemilikan asset Pasar Suruh. Namun kedua belah pihak tidak bisa membuktikan hitam diatas putih sehingga tidak ada bukti kuat pihak mana yang benar-benar mempunyai hak kepemilikan tanah tersebut.

Dalam pengelolaan Pasar Suruh adanya tarik menarik kepentingan dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi. Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa keduanya memiliki kepentingan ekonomi. Perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa semakin terlihat ketika Pemerintah Kabupaten berusaha untuk membangun Pasar Suruh namun diprotes oleh Pemerintah Desa terkait status kepemilikan lahan pasar yang diakui Pemerintah Kabupaten bahwa tanah tersebut merupakan aset daerah yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten. Desa tetap memperjuangkan haknya agar tetap memperoleh dana bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten. Sehingga upaya Pemerintah Kabupaten yang ingin mengambil alih Pasar Suruh diprotes oleh Pemerintah Desa, sebab Pemerintah Desa khawatir jika Desa kehilangan penyumbang terbesar dari pendapatan desa maka akan berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan pembangunan desa dan berkurangnya dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan desa.

Kedua belah pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Suruh memiliki kepentingan yang berbeda dan saling berseberangan. Pemerintah Desa tidak mau jika Desa kehilangan potensi pendapatan Pasar Suruh karena hasil dari pendapatan tersebut merupakan penyumbang besar bagi Pendapatan Asli Desa. Sedangkan Pemerintah Kabupaten memiliki kepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten Semarang menginginkan agar Pasar Suruh segera dibangun supaya meningkatkan retribusi yang tentunya berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain kepentingan pihak pengelola, pedagang juga memiliki kepentingan tersendiri. Yang menjadi kepentingan pedagang di Pasar Suruh adalah pedagang menginginkan agar permasalahan status kepemilikan tanah Pasar Suruh antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten segera terselesaikan agar pembangunan atau revitalisasi pasar dapat terlaksana. Pedagang merasakan bahwa Pasar Suruh kondisinya sudah tidak layak dan perlu adanya peningkatan bangunan fisik pasar. Sebab kondisi bangunan pasar yang buruk mengakibatkan minat pembeli berkurang dan menurunnya pendapatan para pedagang.

4.2. Dampak Sosial dan Ekonomi adanya Tarik Menarik Kepentingan dalam Pengelolaan Pasar Suruh

4.2.1. Dampak Sosial

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Pasar Suruh yang mengakibatkan Pasar Suruh tidak segera di renovasi berdampak pula pada penurunan jumlah pedagang. Menurunnya jumlah pedagang disebabkan karena menurunnya jumlah pembeli. Pedagang yang mengalami penurunan omset pada akhirnya gulung tikar dan terpaksa menutup tempat dagangan mereka. Turunya jumlah pembeli di Pasar Suruh adalah dampak ekonomi yang timbul dari permasalahan yang terjadi. Selain menurunnya jumlah pembeli, faktor lain yang menyebabkan pedagang menutup tempat dagangan mereka adalah tidak adanya penerus atau pewaris yang mau melanjutkan usaha yang sudah ada. Sebagian besar pedagang Pasar Suruh sudah berjualan dalam waktu yang lama, namun jika pemiliknya sudah meninggal seringkali tidak ada yang melanjutkan. Akibatnya mereka terpaksa menutup kiosnya. Jumlah kios/los yang tutup sebanyak 76, sehingga pedagang yang sudah tidak berdagang sebanyak 76 pedagang.

Dampak lain dari adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan Pasar Suruh adalah semakin meningkatnya daya persaingan di antara para pedagang. Persaingan yang semakin ketat seringkali menimbulkan konflik antar pedagang dan hubungan yang tidak harmonis antar pedagang. Total skor mengenai meningkatnya persaingan antar pedagang adalah 180 dengan persentase sebesar 61,1 % sehingga dapat disimpulkan bahwa pedagang setuju bahwa persaingan antar pedagang meningkat. Jumlah pedagang yang merasakan dampak tersebut dan yang tidak merasakannya tidak jauh berbeda. Namun tetap lebih banyak jumlah pedagang yang merasakan bahwa sepinya jumlah pembeli mengakibatkan meningkatnya persaingan antar pedagang semakin ketat. Persaingan tersebut membuat para pedagang kemudian menempuh berbagai cara yang tidak beretika seperti menjelek-jelekkan barang dagangan pesaing. Hal ini selanjutnya membuat hubungan para pedagang menjadi renggang. Persaingan

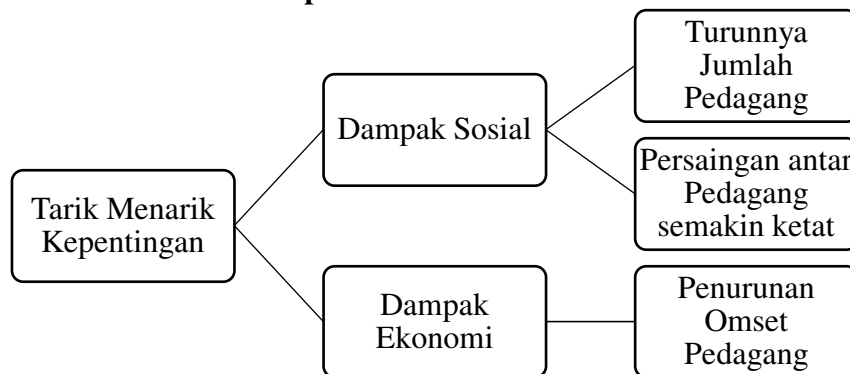
yang ketat antar pedagang mengakibatkan munculnya konflik antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain di Pasar Suruh, antar sesama pedagang sering terjadi persaingan yang tidak sehat.

4.2.2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya perbedaan kepentingan dan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten adalah adanya penurunan omset/pendapatan pedagang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian besar pedagang Pasar Suruh mengalami penurunan pendapatan. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah berkurangnya jumlah pembeli yang berkunjung ke Pasar Suruh. Berdasarkan perhitungan total skor mengenai menurunnya penghasilan pedagang akibat sepi pengunjung adalah sebesar 227 dengan persentase sebesar 76,9 % . Persentase tersebut menunjukkan bahwa pedagang setuju jika pendapatan pedagang menurun akibat sepi pembeli.

Dampak langsung dan nyata dari adanya tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan Pasar Suruh adalah semakin menurunnya jumlah pembeli dan menurunnya pendapatan pedagang. Penurunan jumlah pembeli tersebut disebabkan karena kondisi bangunan fisik pasar yang buruk dan semakin merebaknya pasar modern disekitar Pasar Suruh. Menurunnya omset pedagang berdampak pada modal pedagang yang berkurang hingga nyaris bangkrut. Kondisi tersebut mengakibatkan pedagang terpaksa menutup kios mereka.

Gambar 1
Dampak Sosial dan Ekonomi



Sumber: Data Primer yang diolah 2017

5. SIMPULAN

Pengelolaan pasar suruh belum dilakukan dengan maksimal dikarenakan masih terdapat dua permasalahan utama yaitu sarana prasarana pasar yang kurang baik; terutama bangunan fisik pasar dan permasalahan kepemilikan tanah pasar. Sesuai dengan tema utama penelitian ini, maka permasalahan kepemilikan ini dikarenakan:

1. Terjadinya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan Pasar Suruh disebabkan karena kepentingan yang berbeda antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan pedagang Pasar Suruh. Pemerintah Kabupaten memiliki kepentingan pengembangan pengelolaan pasar tradisional serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Desa memiliki kepentingan mempertahankan kepemilikan tanah pasar sebagai bagian dari sejarah desa dan mempertahankan perolehan bagi hasil pendapatan pasar yang merupakan penyumbang terbesar dana desa. Pedagang Pasar Suruh memiliki kepentingan agar Pasar Suruh segera dibangun sehingga pedagang dan pembeli merasa nyaman dan juga tidak enggan ke Pasar Suruh karena kondisi Pasar yang buruk dan tidak nyaman. Dengan meningkatnya jumlah pembeli maka pendapatan pedagang akan meningkat.
2. Tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan Pasar Suruh berpotensi mengakibatkan penurunan jumlah pedagang yang perlu diuji lebih lanjut. Selain itu tarik menarik kepentingan yang terjadi menjadi pemicu konflik

antar pedagang yang disebabkan oleh persaingan antar pedagang yang semakin ketat. Penurunan jumlah pedagang dan persaingan antar pedagang merupakan dampak sosial yang diakibatkan adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan Pasar Suruh, sedangkan dampak ekonomi yang terjadi yaitu tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa berpotensi menyebabkan pendapatan pedagang semakin menurun. Hal tersebut disebabkan dari kondisi bangunan fisik Pasar Suruh yang buruk serta pengelolaannya yang kurang maksimal. Selain itu tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan Pasar Suruh juga menghambat upaya pengembangan Pasar Suruh untuk segera dilakukan renovasi bangunan fisik pasar sehingga memberikan pengaruh bagi para pedagang.

5. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain :

5.1 Saran Praktis

1. Pemerintah Kabupaten Semarang untuk lebih meningkatkan pengelolaan pasar tradisional dengan cara melakukan upaya pengembangan pasar tradisional dimana pedagang dan masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan, baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat *top-down* melainkan bersifat *bottom-up* yang berdasarkan pada pilihan publik.
2. Pemerintah Desa Suruh harus lebih bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kepentingan publik salah satunya yaitu pengembangan pasar tradisional khususnya Pasar Suruh agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
3. Pedagang Pasar Suruh harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil pemerintah terutama dalam rangka peningkatan pengelolaan Pasar Suruh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pedagang serta menguntungkan semua pihak.

5.2. Saran Akademis

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian kedepan dapat lebih berfokus pada penelitian kuantitatif dengan mengukur dampak sosial dan ekonomi akibat tarik menarik kepentingan yang terjadi.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Suruh, apakah kebijakan revitalisasi tersebut memberikan dampak positif atau negatif bagi pedagang dan masyarakat sekitar.
3. Penelitian ke depan dapat meneliti dampak sosial dan ekonomi setelah adanya kebijakan revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten selaku pihak pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*. Jakarta : Kemitraan
- Caporaso, James A & David P Levine. (2015). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John. (2014a). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John. (2014b). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmadi, Hamid. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- KPK. (2009). *Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (30th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachbini, Didik J. (2002). *Ekonomi Politik : Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia
- Ratri Medya & Wisnu Chandra K (Eds). (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, P. Sondang. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, E. Amir. (Eds). (1999). *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Trisnawati, Erni S & Saefullah, Kurniawan. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

Yustika, Ahmad E. (2011). *Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wiludjeng, Sri. (2007). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal, Artikel, Skripsi:

Margina Ferlan dan S.Harto, (2013), Manajemen Pelayanan Pemerintah Dalam Pembangunan Pasar, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol 11(2): 103

Febrianty, Dessy, (2013), Model of Role Srengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Studi Case Beringharjo Market, Jogjakarta. Dalam *Journal of Economic and Sustainable Development*. Vol. 4(5): 115-124.

Maharani, Aprilia dan Yanuardi, (2013), Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Bagi Pedagang Pasar. Dalam *Jurnal Adinegara*. Vol. 9(3)

Karjuni Dt.Maani,(2013), *Pergulatan Antara Ekonomi dan Politik dalam Perspektif Public Choice*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. hlm.2 diakses dan diunduh melalui <http://ejournal.unp.ac.id> pada 12 Januari 2017 pukul 07.58 WIB.

Yulianti, Nella, (2011), Dampak Perubahan Lokasi Pasar Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Nagari Muaralabuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, *Skripsi*, Universitas Andalas Padang diakses dan diunduh pada 09 Januari 2017 pukul 20.40 melalui <http://repository.unand.ac.id>

Musrifah, Siti, (2015), *Dinamika dan Konflik dalam proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang diakses dan diunduh pada 09 Januari 2017 pukul 22.10 melalui <http://lib.unnes.ac.id>

Kurniawan, Wawan, (2015), *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, hlm.12. diakses dan diunduh melalui www.lib.unnes.ac.id pada 08 Februari 2017.

Zunaidi, Muhammad, (2013), *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern*, *Jurnal Sosiologi Islam* vol.3(1): 54

Ariswan Barmawi, (2016), *Pengelolaan Pasar Tradisional di Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)*, *Skripsi*, Universitas Lampung. Diakses dan diunduh pada 09 Januari 2017 pukul 20.15 melalui <http://digilib.unila.ac.id>

Rizky, Muhammad, (2014), *Konflik Aset di Daerah Pemekaran, Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan*, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak diterbitkan. Diakses dan diunduh pada 09 Januari 2017 pukul 22.35 melalui <http://repository.uinjkt.ac.id>

Wijaya, Indra, (2010), *Evaluasi Dampak Sosial Pedagang Dari Proyek Pembangunan Pasar Ngarsopuro*, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, diakses dan diunduh melalui www.digilib.uns.ac.id pada 31 Januari 2017 Pukul 07.32 WIB

Web:

www.semarangkab.go.id

www.kpk.go.id

<https://semarangkab.bps.go.id/>

Peraturan-peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional